

**OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

RIDHO DWI ADIWARDHANA
NPP. 29.1988

*Asdaf Provinsi Kalimantan Utara
Program Studi Keuangan Publik*

Email:

ridhodwiaw28298@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): (Contains the background behind the research) The importance of budget absorption starting from planning to accountability reports has an impact on the government regarding its performance on public services. Sub-optimal absorption of regional budgets indicates that the use of resources is not optimal to produce activities that stimulate the regional economy. 2021 is a sufficient year in the budget absorption process due to the pandemic, which has forced the government to prioritize public health compared to the planned development in 2020. **Objective:** to get an idea related to optimizing the absorption of regional spending budgets in the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD.) **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result** Optimizing the Absorption of Regional Revenue and Expenditure Budgets During the Covid-19 Pandemic in the Regional Financial and Asset Management Agency of Bulungan Regency is optimal because there are seven indicators that are quite good, namely physical output indicators, non-physical outputs, output functions, direct effects on the long term. medium, ultimate goal, achievement, and many positive impacts. **Conclusion:** Absorption of the regional budget in the 2021 APBD of Bulungan Regency is quite optimal. There are seven indicators that are quite good and one indicator that is not good. The inhibiting factor is the low rate of budget absorption. Efforts are being made, namely evaluation to support Optimal Budget Absorption in Bulungan Regency as a supporter of accelerating the handling of Covid-19 using budgets from other activities that are not priorities in supporting the acceleration of handling Covid-19.

Keywords: Covid-19, Optimization, Absorption of Regional Budget (APBD)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Pentingnya Penyerapan Anggaran dimulai dari perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban memiliki dampak untuk pemerintah terkait kinerjanya terhadap pelayanan masyarakat umum. Penyerapan anggaran belanja daerah yang kurang maksimal mengindikasikan tidak optimalnya penggunaan sumber daya untuk menghasilkan kegiatan yang menjadi stimulus perekonomian daerah Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup dalam proses penyerapan anggaran karena adanya pandemi yang membuat pemerintah harus memprioritaskan kesehatan masyarakat dibanding dengan pembangunan yang telah direncanakan di Tahun 2020. **Tujuan :** untuk mendapatkan gambaran terkait optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 **Hasil/Temuan:.** Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selama Pandemi *Covid-19* dalam di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan sudah cukup optimal karena terdapat tujuh indikator yang cukup baik yaitu pada indikator keluaran fisik, keluaran non-fisik, fungsi *output*, efek langsung pada jangka menengah, tujuan akhir, pencapaian, dan banyak dampak positif. **Kesimpulan:** Penyerapan Anggaran Belanja daerah pada APBD Tahun 2021 Kabupaten Bulungan cukup optimal. Terdapat tujuh indikator cukup baik dan satu indikator belum baik. Faktor penghambatnya yaitu Rendahnya Tingkat Penyerapan Anggaran. Upaya yang dilakukan yaitu evaluasi guna menunjang Optimalnya Serapan Anggaran di Kabupaten Bulungan sebagai pendukung percepatan penanganan *Covid-19* menggunakan anggaran dari kegiatan lain yang bukan prioritas dalam mendukung percepatan penanganan *Covid-19*.

Kata kunci: *Covid-19*, Optimalisasi, Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang dijaiankan di Indonesia pada awai kemerdekaan menganut sistem sentraisasi, serta sangat suuit untuk mereaiisasikan cita-cita yang tercantum daiam pembukaan undang- undang dasar tahun 1945 itu sebab luasnya wiiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perencanaan sangat penting untuk manajemen keuangan sehingga dapat mengeioia peiaksanaan kegiatan dengan lebih baik. Menindaklanjuti reguiasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan cepat meiakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar pemerintah dengan cepat memutus rantai penyebaran virus tersebut dan juga bisa mengontroi arus keiuar masuknya warga kedaiam daerah, melakukan *work from home*. Menindaklanjuti reguiasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan cepat meiakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar pemerintah dengan cepat memutus rantai penyebaran virus tersebut dan juga bisa mengontroi arus keiuar masuknya warga kedaiam daerah, melakukan *work from home*. Penyerapan Anggaran Pendapatan Daerah Bulungan tahun 2017, sekitar Rp1,199 triliun, lanjut pada 2018, Pendapatan daerah Bulungan hanya sekitar Rp Rp1,172 triliun.

Realisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan pada semester I tahun 2021, secara keseluruhan baru mencapai 40 persen dari nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bulungan 2021 sebesar Rp1,2 triliun lebih. Beberapa anggaran yang disebut Non Rekening Kas Umum daerah (non RKUD), diantaranya Dana Kapitasi, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), serta anggaran yang dikeioia oieh Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD yakni sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan seperti di RSD dr. H. Soemarno Sostroatmodjo.

Pada masa pandemi yang berjaiian hampir sepanjang tahun 2021 ini, banyak dana dari Anggaran beianza Daerah yang penyerapannya untuk keperluan penanganan dan pencegahan *Covid-19*. Kejadian dan persoaian yang terpapar diatas menjadi hai yang mendasari bahwa harus ada upaya diiakukan untuk mengatasi kejadian dan persoaian tersebut. Berdasarkan hai itu, daiam peneitian ini, penuhiis mengangkat sebuah tema yakni “OPTIMAIISASI PENYERAPAN

ANGGARAN PENDAPATAN BEIANJA DAERAH SEIAMA PANDEMI *COVID-19* DI KABUPATEN BUIUNGAN PROVINSI KAIMANTAN UTARA”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelayanan publik oleh aparatur yang diharapkan pemerintah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) masih belum berjalan dengan sebagai mana mestinya. hampir setiap bulan ada aparatur yang tidak melaksanakan jam kerjanya secara penuh baik itu sakit maupun cuti dengan beberapa alasan, apalagi pada masa pandemi saat ini ada beberapa aparatur yang terkena Covid-19 dan mengharuskan mereka untuk melaksanakan karantina dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara terutama pada bulan Agustus tercatat ada tiga aparatur yang terkena Covid-19.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Jumadi, 2015, berjudul “Analisis Realisasi Penyerapan Anggaran b\Beianza Langsung Pada APBD tahun 2015 di Kabupaten Buiungan Provinsi Kaimantan Utara.”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni ditemukan beberapa permasalahan dalam pelayanan publik di lapangan. seperti kualitas kedisiplinan pegawai yang masih kurang baik dan proses serta prosedur yang cenderung berbelit belit sehingga masyarakat merasa kesulitan dan kurang puas sehingga diperlukan upaya perbaikan pelayanan publik guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Serapan anggaran Beianza Modal dapat terlambat salah-satunya dapat dipengaruhi oleh lambatnya penetapan APBD. 2. Pembebasan lahan yang terhambat menjadi faktor penting rendahnya serapan anggaran beianza modal, hal ini terlihat jelas bahwa pada jenis beianza modal Tanah mengalami serapan paling rendah. 3. Pengadaan barang dan jasa seringkali terhambat karena terjadinya keterlambatan penetapan pemenang pada pelelangan, sehingga pekerjaannya pun harus terhambat bahkan sampai pada pertengahan anggaran baru bisa dimulai. Efektivitas pelaksanaan anggaran beianza pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2011- 2015 cukup bervariasi.

Kedua, Dwi Nofita Sari 2018 dari , berjudul “Analisis Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran beianza” . Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan anggaran beianza pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2011- 2015 cukup bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada

tahun 2014 dan yang terendah tahun 2013. Pada tahun 2011,2012,2015 dikatakan kurang efektif, hal ini karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai.

Ketiga, Vanrio Alfian Tardo Silaban 2020 yang berjudul “Efektivitas penyerapan anggaran belanja langsung pada APBD tahun 2020 selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bulungan”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a. Pencapaian tujuan, terdiri atas 2 indikator yakni kurun waktu dan sasaran dan hasil dalam penelitian ini penulis mendapatkan kurun waktu yang dilakukan Tim Anggaran BPKAD untuk menyalurkan realisasi anggaran ke masyarakat yakni 5 bulan dan sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat.b. Integrasi, indikatornya yakni sosialisasi dan hasilnya yakni Tim Anggaran telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka perubahan bentuk anggaran bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). c. Adaptasi, indikatornya adalah kemampuan BPKAD yang dengan sigap melakukan perubahan anggaran belanja selama tahun 2020 yang diakibatkan Covid-19 dan hasilnya ialah terjadi 5 kali perubahan dalam anggaran di tahun 2020 sesuai dengan peraturan dari Pemerintahan Pusat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berlandaskan pada rumusan masalah, tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran terkait optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah pada APBD dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk mengetahui penyebab yang menghambat proses penyerapan anggaran belanja daerah selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam memaksimalkan anggaran belanja daerah agar tepat sasaran selama pandemi *Covid-19* di kabupaten bulungan provinsi Kalimantan utara.

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi.

Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain". Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data.

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, "setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen". Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Dialihfungsikan terkhusus dalam pengadaan Barang dan Jasa penunjang kesehatan untuk penanggulangan *Covid-19*

Alokasi Dana APBD pada Tahun 2021 selama masa pandemi *covid-19* merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 2 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *corona virus disease (covid-19)* dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan

perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dalam rangka menghentikan rantai penyebaran virus corona yang menyebar selama tahun 2021 dengan mengalihfungsikan beberapa agenda pembangunan yang disusun ditahun 2021. Pengalokasian dana tersebut telah beberapa kali di revisi oleh Pemerintah Daerah selama kurang lebih 2 bulan setelah terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 hingga keluarlah Perbup Nomor 7 Tahun 2020. Pemerintah juga mempercepat proses registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Covid-19* yang belum memiliki nomor registrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah mengetahui bagaimana komposisi belanja daerah yang dialihfungsikan dalam pengadaan barang dan jasa untuk kesehatan selama pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bulungan peneliti memasukan pendapat para ahli sebagai syarat dalam melaksanakan penelitian dimana pendapat para ahli ini menjadi indikator dalam melakukan analisis terhadap sesuatu yang terjadi di lapangan.

Pada hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah yang dialihfungsikan dalam pengadaan barang dan jasa untuk kesehatan selama pandemi *Covid-19* dimana teori optimalisasi menjadi patokan dalam pelaksanaan penelitian.

A. Pencapaian *output*

I. Keluaran Fisik

Output fisik merupakan sesuatu yang diharapkan dapat langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud atau jelas dengan data. *Output* fisik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyesuaian Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bulungan

Alokasi Pendapatan Daerah dalam APBD awal Kabupaten Bulungan Tahun 2021 sebesar Rp.110.169.410.085,86, kemudian mengalami penambahan sebesar Rp.17.200.740.214,14 dari target pendapatan BPKAD Kabupaten Bulungan. telah ditetapkan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021](#) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya dan sebagai upaya optimalisasi penggunaan dan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa guna percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) dan dampaknya, maka Menteri Keuangan telah melakukan penyempurnaan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya.

b. Penyesuaian Target Belanja Pemerintah Kabupaten Bulungan

Alokasi Belanja Daerah dalam APBD awal Kabupaten Bulungan Tahun 2021 sebesar Rp. 110.169.410.085,86, kemudian mengalami penyesuaian target belanja sebesar mengalami penambahan sebesar Rp. 17.200.740.214,14 dari target belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan . Anggaran Belanja tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum. Penambahan tersebut akibat dari bertambahnya dana yang dibutuhkan karena penambahan belanja operasional. Bertambahnya dana yang dibutuhkan tersebut akibat dari bertambahnya kegiatan baru untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*. anggaran hasil alokasi dana sepenuhnya diperuntukkan untuk kebutuhan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Bulungan. Keluaran fisik (*output* fisik) dalam hal ini yaitu penyesuaian target pendapatan dan belanja , Mendanai Prioritas Penanganan *Covid-19* bidang kesehatan di Kabupaten Bulungan. Penyesuaian target belanja juga terjadi penambahan akibat pelaksanaan *refocusing* anggaran yang membuat pemerintah harus menambahkan rencana kegiatan-kegiatan prioritas untuk penanganan *Covid-19*.

2. Keluaran Non-Fisik

Output non-fisik merupakan sesuatu yang diharapkan dapat langsung dicapai dari suatu kegiatan yang tidak berwujud dan tidak ada datanya. Dinas Kabupaten Bulungan mengalami penambahan anggaran dari pelaksanaan alokasi anggaran untuk penanganan *Covid-19* bidang kesehatan. Akibat dari hal tersebut berdasarkan hasil wawancara, rasa semangat semakin tumbuh dan mendukung harapan dari SKPK yang berada di bidang kesehatan untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*. Hal tersebutlah yang merupakan *output* non-fisk atau keluaran yang tidak berwujud dan tidak dapat di pertanggungjawabkan dengan data.

B. Pencapaian Outcome

1. Fungsi Output

Fungsi keluaran merupakan suatu fungsi dari *output* fisik dan non-fisik yang menyatakan bahwa suatu keluaran itu dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. Setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020, Bupati mengadakan Rapat Koordinasi terkait perubahan bentuk anggaran bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjadi kesalahpahaman karena instruksi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan *refocusing* anggaran yang digunakan

untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona yang terjadi di Kabupaten Bulungan. Akan tetapi hal ini dapat dihadapi Bidang Anggaran BPKAD yang dengan sigap melakukan perubahan terhadap APBD Tahun 2021. Bidang Anggaran menghadapi situasi yang jarang terjadi ini karena Pemerintah Pusat memberikan kebijakan untuk pengalihfungsian anggaran untuk penanganan *Covid-19* ini. Adapun selama perubahan yang dilakukan tersebut, peneliti akan membuat perubahan-perubahan yang dilakukan tim anggaran selama berjalannya APBD Tahun 2021 dengan mengganti Perbup No. 44 Tahun 2019. Perubahan itu yakni :

a. **Perbup No. 4 Tahun 2020, dengan Dasar Hukum**

Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.39/2021 Tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 16.080.000.000,00 dengan rincian Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, semula berjumlah Rp. 1.271.911.177.076,86 bertambah sejumlah Rp.16.080.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.287.991.177.076,86

b. **Perbup No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua dengan Dasar Hukum**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dengan penjelasan Dana alokasi untuk penanganan Bencana Alam dan Non Alam Anggaran dari Belanja Daerah kegiatan pada Belanja tidak terduga bertambah sebesar Rp. 22.132.162.200.90 dari semula sebesar Rp. 2.000.000.000,00 menjadi total sebesar Rp. 24.132.162.200.90.

c. **Perbup No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga dengan Dasar Hukum**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/ dan Nomor 177/KMK.07/2021 dengan penjelasan penyesuaian Dana Transfer Pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, semula berjumlah Rp. 1.271.911.177.076,86 berkurang sejumlah (Rp. 39.747.610.085,86) sehingga menjadi Rp. 1.232.163.566.991,00.

d. **Perbup No. 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat dengan Dasar Hukum**

PERS Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP-30/KLI/2021 tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocusing APBD untuk Penanganan *Covid-19* di daerah dengan penjelasan Penundaan Dana Transfer Pusat Karena tidak sesuai dengan SKB Dua Menteri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, semula berjumlah Rp.

1.271.911.177.076,86 berkurang sejumlah (Rp. 110.169.410.085,86) sehingga menjadi Rp. 1.161.741.766.991,00

2. **Efek Langsung pada Jangka Menengah**

Efek langsung pada jangka menengah dari pengoptimalisasian Penyerapan Anggaran di Dinas Kesehatan merupakan suatu hasil sementara atau hasil yang dirasakan pada jangka waktu menengah dari target waktu jangka panjang yang belum bisa ditentukan. anggaran yang sudah terealisasi selama masa pandemi untuk mendukung dalam pencegahan kasus *Covid-19* di Kabupaten Bulungan dengan jumlah total Rp.3.089.242.700, Anggaran berdasarkan gambar diatas merupakan bentuk nyata dari dukungan Penanganan *Covid-19* serta pencegahan virus *Covid-19* serta realisasi anggaran yang sudah direncanakan oleh pemerintah,

C. **Pencapaian *Benefit***

1. **Tujuan Akhir**

Tujuan akhir merupakan suatu titik akhir dimana suatu kegiatan atau program itu telah sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Tujuan dari pengoptimalisasian Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bulungan adalah untuk meminimalisir kasus positif *Covid-19*, dan untuk memulihkan kembali serta meningkatkan Penyerapan Anggaran dan ekonomi yang berdampak akibat pandemi *Covid-19*, dan teratasinya segala faktor pendukung penyebaran *Covid-19*.

2. **Pencapaian**

Pencapaian merupakan sesuatu yang dicapai setelah diterapkannya kebijakan atau dilakukannya suatu kegiatan dan program. salah satu bentuk pencapain pemerintah dalam mendukung pencegahan kasus *Covid-19* di Kabupaten Bulungan dengan merealisasikan Pengalokasikan Penyerapan Anggaran untuk penanganan *Covid-19*. pencapaian dari pengoptimalisasian Penyerapan Anggaran sudah terlihat baik dan sudah mencapai tujuan akhir.

D. **Pencapaian *Impact***

1. **Dampak Positif**

Dampak positif adalah suatu pengaruh baik yang dihasilkan oleh suatu kebijakan atau kegiatan yang telah terlaksana. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, peneliti menguraikan dampak positif dari Optimalisasi Penyerapan Anggaran, yaitu:

a. Penurunan kasus Covid-19 di Kabupaten Bulungan

Penurunan kasus positif Covid-19 setiap tahunnya terus menurun mengingat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bulungan terhadap protokol Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulungan telah mengambil langkah untuk melakukan pencegahan dan percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui realokasi anggaran yang difokuskan untuk penanganan pandemi.

b. Meningkatnya jumlah masyarakat yang di vaksin

Pemerintah mulai mendorong vaksinasi dosis tiga di seluruh wilayah, perkembangan terkini tingkat vaksinasi dosis 3 di Kalimantan Utara tertinggi adalah di Kabupaten Bulungan yang kini telah

3. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah suatu pengaruh buruk yang terjadi akibat dari suatu kebijakan atau kegiatan yang telah terlaksana. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pembisnis besar dinilai dapat dipengaruhi dengan kehilangan pelanggannya serta investasi akibat melemahnya daya beli masyarakat. pandemi Covid-19 sekarang ini juga berdampak pada UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bulungan memberi kelonggaran pembayaran iuran pajak sewa pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Pujasera, di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. Dalam satu tahun masa sewa ini lunas. Jadi mau 2 kali, atau 3 kali bayar silakan, supaya tidak memberatkan mereka dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti ini.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Jumadi, 2015, berjudul “Analisis Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pada APBD tahun 2015 di Kabupaten Buiungan Provinsi Kaimantan Utara.”.. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni ditemukan beberapa permasalahan dalam pelayanan publik di lapangan. seperti kualitas kedisiplinan pegawai yang masih kurang baik dan proses serta prosedur yang cenderung berbelit belit sehingga masyarakat merasa kesulitan dan kurang puas sehingga diperlukan upaya perbaikan pelayanan publik guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Serapan anggaran Belanja Modal dapat terlambat salah-satunya dapat dipengaruhi oleh lambatnya penetapan APBD. 2. Pembebasan lahan yang terhambat menjadi faktor penting rendahnya serapan anggaran belanja modal, hal ini terlihat jelas bahwa pada jenis belanja modal Tanah mengalami serapan paling rendah. 3. Pengadaan barang dan jasa seringkali terhambat karena

terjadinya keterlambatan penetapan pemenang pada pelelangan, sehingga pekerjaannya harus terhambat bahkan sampai pada pertengahan anggaran baru bisa dimulai. Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2011- 2015 cukup bervariasi.

Dwi Nofita Sari 2018 dari , berjudul “Analisis Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja”. Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2011- 2015 cukup bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2014 dan yang terendah tahun 2013. Pada tahun 2011,2012,2015 dikatakan kurang efektif, hal ini karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai.

Vanrio Alfian Tardo Silaban 2020 yang berjudul “Efektivitas penyerapan anggaran belanja langsung pada APBD tahun 2020 selama pandemi *Covid-19* di kabupaten bulungan”. Adapun temuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a. Pencapaian tujuan, terdiri atas 2 indikator yakni kurun waktu dan sasaran dan hasil dalam penelitian ini penulis mendapatkan kurun waktu yang dilakukan Tim Anggaran BPKAD untuk menyalurkan realisasi anggaran ke masyarakat yakni 5 bulan dan sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat.b. Integrasi, indikatornya yakni sosialisasi dan hasilnya yakni Tim Anggaran telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka perubahan bentuk anggaran bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). c. Adaptasi, indikatornya adalah kemampuan BPKAD yang dengan sigap melakukan perubahan anggaran belanja selama tahun 2020 yang diakibatkan *Covid-19* dan hasilnya ialah terjadi 5 kali perubahan dalam anggaran di tahun 2020 sesuai dengan peraturan dari Pemerintahan Pusat.

Pembaharuan temuan hasil penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Penyerapan Anggaran Belanja daerah pada APBD Tahun 2021 Kabupaten Bulungan cukup optimal. Terdapat tujuh indikator cukup baik dan satu indikator belum baik. Faktor penghambatnya yaitu Rendahnya Tingkat Penyerapan Anggaran. Upaya yang dilakukan yaitu evaluasi guna menunjang Optimalnya Serapan Anggaran di Kabupaten Bulungan sebagai pendukung percepatan penanganan *Covid-19* menggunakan anggaran dari kegiatan lain yang bukan prioritas dalam mendukung percepatan penanganan *Covid-19*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan terhadap rendahnya penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada APBD Tahun 2021 selama pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, peneliti mengambil teori tentang optimalisasi menurut Mardiasmo yang terdiri atas tiga dimensi yakni:

1. **Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selama Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara**

Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selama Pandemi *Covid-19* dalam di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan sudah cukup optimal karena terdapat tujuh indikator yang cukup baik yaitu pada indikator keluaran fisik, keluaran non-fisik, fungsi *output*, efek langsung pada jangka menengah, tujuan akhir, pencapaian, dan banyak dampak positif.

2. **Hambatan Yang dilakukan Dalam Proses Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selama Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara**

Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selama Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bulungan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, masih ada hambatan dan kendala yang dihadapi Pemkab Bulungan dalam mengoptimalkan Penyerapan Anggaran. Pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bulungan masih sering terjadinya Penyerapan Anggaran yang belum maksimal. Kemudian kapasitas birokrasi dan komitmen politik yang beragam di daerah menyebabkan Rendahnya Serapan Anggaran.

3. **Upaya Yang dilakukan Dalam Proses Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selama Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara**

Pengoptimalisasian Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selama Pandemi *Covid-19* di Bulungan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang harus diatasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan upaya yang harus dilakukan evaluasi guna menunjang Optimalnya Serapan Anggaran di Kabupaten Bulungan sebagai pendukung percepatan penanganan *Covid-19* menggunakan anggaran dari kegiatan lain yang bukan prioritas dalam mendukung percepatan penanganan *Covid-19*. Evaluasi bertujuan untuk menghindari adanya

hambatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Ini penting agar kinerja Pemkab Bulungan berjalan dengan lancar di tahun ini.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mardiasmo saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Optimalisasi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Selama Pandemi *Covid-19* Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala pemerintahan Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Bastian. 2007. *Sitem Akuntansi Sector Publik, edisi 2 Jakarta: Salemba Empat*.
- CressweII, J W 2009. *Research Desighn Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan metode Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kamarudin. 1972. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Angkasa.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudjia, R. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*